

TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI REVIU
SAKIP TAHUN 2023 KECAMATAN BATANG LUPAR



KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak Kode Pos : 78766

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 700.04/3204/A.1/Itprov tanggal 29 Juli 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori predikat” untuk memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Kecamatan Batang Lupar Tahun 2022, maka diperoleh nilai 58,76 dengan kategori CC (Cukup) dibandingkan dengan hasil nilai tahun 2020 yaitu 45,94 dengan kategori C (Kurang) adapun uraian berdasar komponen dapat dilihat pada table berikut ini :

NO.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2022
A.	Perencanaan Kinerja	30	19,20
B.	Pengukuran Kinerja	30	17,10
C.	Pelaporan Kinerja	15	8,70
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
	Jumlah	100	58,76

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana kerja tahun 2022, dan perjanjian kinerja tahun 2022 dari para personil perangkat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa pohon kinerja dan dokumen cascading;
- 2) Dokumen rencana kerja tahun 2022 sudah dipublikasikan, namun masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : Dokumen rencana kerja tahun 2022 tidak selaras terhadap rencana strategis

2021-2026 dalam hal rumusan sasaran, penggunaan indikator, serta penetapan target kinerja;

- 3) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan kinerja antar level jabatan dengan baik, misalnya hasil kerja Sekcam belum diketahui Batasannya secara spesifik sehingga keterkaitannya terhadap Indikator Camat belum dapat diketahui;
- 4) Rumusan hasil dan indikator kinerja yang jelas pada perangkat daerah belum diimplementasikan sampai pada tataran program dan kegiatan. Perangkat daerah belum dapat menyajikan secara jelas korelasi yang berkesinambungan secara berjenjang dari IKU perangkat daerah sampai dengan output kegiatan. Hal ini terjadi karena indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan belum didefinisikan;
- 5) Perencanaan kinerja yang ada belum dapat dibuktikan berdasarkan analisis kinerja yang memadai. Perencanaan kinerja perangkat daerah telah didasari pada Upaya monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya, yaitu kegiatan monitoring SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) namun demikian, monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan belum didukung dengan data yang handal serta analisis permasalahan dan sintesis Solusi yang cukup.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) SOP Pengumpulan Data Kinerja yang digunakan perangkat daerah belum memberikan pedoman tentang bagaimana cara masing-masing level jabatan memperoleh data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan;
- 2) Perangkat daerah telah memiliki defenisi operasional untuk mengukur indikator kinerja sampai pada level jabatan coordinator, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesinambungan indikator kinerja antar jenjang. Hal ini merupakan akibat dari kurang selarasnya indikator kinerja antar level pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Belum jelasnya Batasan pelayanan public yang difasilitasi oleh Kecamatan Batang Lupar berakibat lemahnya data kinerja pendukung nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- 3) Pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/ anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dapat memberikan informasi akurat mengenai permasalahan

dan hambatan yang ditemui dalam Upaya mencapai kinerja sehingga perangkat daerah tidak dapat melakukan perubahan aksi yang tepat guna mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya, rapat dalam kegiatan monitoring kinerja hanya membahas serapan anggaran.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Perangkat daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 per tanggal Februari 2023 dan telah disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada tanggal 15 Februari 2023;
- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Tahun 2022 telah menginformasikan hambatan atas Upaya pencapaian kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja secara memadai yang menjadi kekurangan yang perlu diperhatikan. Laporan Kinerja yang komprehensif harus mencakup identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi serta perbaikan yang kurang memadai;
- 3) Pelaporan Kinerja kurang dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja. Substansi yang disajikan dalam laporan kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/ kebijakan karena masih terdapat analisis permasalahan dan pembentukan Solusi yang kurang memadai. Laporan Kinerja perangkat daerah harus dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/ kebijakan karena masih terdapat analisis permasalahan dan pembentukan Solusi yang kurang memadai;
- 4) Dokume Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, salah satu contoh belum membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir;

d. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Rapat evaluasi yang dilakukan belum membahas kondisi aktual dalam Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Kecamatan Batang Lupar sebagaimana yang telah dicanangkan. Rapat kinerja hanya membahas serapan anggaran, rapat monitoring yang diselenggarakan belum membahas kondisi aktual dalam Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap target yang telah dicanangkan. Contoh terkait nilai SAKIP tahun 2022 tidak dilakukan identifikasi faktor-faktor yang secara aktual berpengaruh terhadap peningkatan AKIP di Kecamatan Batang Lupar. Ini dapat mencakup

faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan, kurangnya koordinasi antar unit, atau masalah internal lainnya;

- 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Upaya-upaya spesifik yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah guna memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah kurang mendapatkan pembahasan dalam rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja, seperti melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Tindakan perbaikan secara teratur, ditinjau kemajuan yang telah dicapai, identifikasi kendala yang muncul, dan lakukan penyesuaian jika diperlukan;
- 3) Implementasi SAKIP perangkat daerah telah meningkat karena telah terdapat hasil dari usaha perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya untuk hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan hasil penyusunan dokumen rencana kinerja tahun berjalan selaras terhadap renstra 2021-2026;
- 2) Memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik;
- 3) Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran;
- 4) Melengkapi pedoman pengukuran kinerja dengan tata cara mendapatkan data kinerja yang jelas dan dapat di andalkan;
- 5) Melaksanakan pengukuran kinerja kegiatan serta menyediakan data kinerja yang dapat di andalkan;
- 6) Melengkapi SOP pengukuran kinerja dengan tata cara dalam pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat di andalkan;
- 7) Meninjau Kembali dan menyempurnakan definisi operasional indikator kinerja yang digunakan terutama indikator individu;
- 8) Melaksanakan rapat pengukuran kinerja sesuai dengan kondisi actual terhadap target yang telah dicanangkan;
- 9) Pengukuran kinerja harus dimanfaatkan dalam melakukan penyesuaian strategi/kebijakan aktivitas/anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;

- 10) LKJiP harus memuat informasi hambatan pencapaian kinerja dan rekomendasi perbaikan yang memadai atas kinerja agar dapat menghasilkan Tindakan solusi yang tepat;
- 11) Menindaklanjuti rekomendasi dalam Upaya perbaikan kinerja/solusi yang dirumuskan dalam LKJiP; dan
- 12) Melaksanakan aksi/Tindakan yang diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta memonitoring perkembangannya.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu telah menindak lanjuti keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022.

**KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
REVIU SAKIP
KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2023**

KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIEW SAKIP KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2023

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	700.1.2.7/164/LHE/INK AB/IB1 Tanggal 24 Agustus 2023	1. Dokumen rencana kerja tahun 2022 tidak selaras terhadap rencana strategis 2021-2026 dalam hal rumusan sasaran, penggunaan indikator, serta penetapan target kinerja.	1. Memastikan hasil penyusunan dokumen rencana kinerja tahun berjalan selaras terhadap renstra 2021-2026.	Telah terlampir pada Laporan Rekapitulasi Renja PD dan Pencapaian Renstra dapat di lihat di table T-C.29 dan Evaluasi Renja Tahun 2022.
		2. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan kinerja antar level jabatan dengan baik, misalnya hasil kerja Sekcam belum diketahui Batasannya secara spesifik sehingga keterkaitannya terhadap Indikator Camat belum dapat diketahui.	2. Memastikan agar dokumen perencanaan kinerja yang disusun mampu menunjukkan keselarasan antara level jabatan dengan baik.	Telah tersusun pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.
		3. Rumusan hasil dan indikator kinerja yang jelas pada perangkat daerah belum di implementasikan sampai pada tataran program dan kegiatan. Perangkat daerah belum dapat menyajikan secara jelas korelasi yang berkesinambungan secara berjenjang dari IKU perangkat daerah sampai dengan output kegiatan. Hal ini terjadi karena indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan belum didefinisikan	3. Melengkapi indikator dan target kinerja pada tataran program dan kegiatan dalam dokumen penganggaran.	Telah terlampir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 (DPPA).

	4.	SOP Pengumpulan Data Kinerja yang digunakan perangkat daerah belum memberikan pedoman tentang bagaimana cara masing-masing level jabatan memperoleh data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan	4.	Melengkapi SOP pengukuran kinerja dengan tata cara dalam pengumpulan data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan.	Telah terlampir pada SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2023.
	5.	Perangkat daerah telah memiliki definisi operasional untuk mengukur indikator kinerja sampai pada level jabatan koordinator, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesinambungan indikator kinerja antar jenjang. Hal ini merupakan akibat dari kurang selarasnya indikator kinerja antar level pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Belum jelasnya Batasan pelayanan publik yang difasilitasi oleh Kecamatan Batang Lupar berakibat lemahnya data kinerja pendukung nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	5.	Meninjau Kembali dan menyempurnakan definisi operasional indikator kinerja yang digunakan terutama indikator individu.	Telah terlampir pada SK Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

No.	Nomor dan Tanggal LHP	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<p>6. Pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas/ anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dapat memberikan informasi akurat mengenai permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam Upaya mencapai kinerja sehingga perangkat daerah tidak dapat melakukan perubahan aksi yang tepat guna mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya, rapat dalam kegiatan monitoring kinerja hanya membahas serapan anggaran.</p>	<p>6. Melaksanakan rapat pengukuran kinerja sesuai dengan kondisi aktual terhadap target yang telah dicanangkan.</p>	<p>Telah Tersusun pada Laporan Monev Triwulanan 2023.</p>
		<p>7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Tahun 2022 telah menginformasikan hambatan atas Upaya pencapaian kinerja, dan rekomendasi perbaikan kinerja secara memadai yang menjadi kekurangan yang perlu diperhatikan. Laporan Kinerja yang komprehensif harus mencakup identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi serta perbaikan yang kurang memadai.</p>	<p>7. LKjiP harus memuat informasi hambatan pencapaian kinerja dan rekomendasi perbaikan yang memadai atas kinerja agar dapat menghasilkan Tindakan solusi yang tepat.</p>	<p>Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) tahun 2023 berupa Aplikasi E-Sakip yang memuat informasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p>

		<p>8. Rapat evaluasi yang dilakukan belum membahas kondisi aktual dalam Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Kecamatan Batang Lupar sebagaimana yang telah dicanangkan. Rapat kinerja hanya membahas serapan anggaran, rapat monitoring yang diselenggarakan belum membahas kondisi aktual dalam Kecamatan Batang Lupar yang berpengaruh terhadap target yang telah dicanangkan. Contoh terkait nilai SAKIP tahun 2022 tidak dilakukan identifikasi faktor-faktor yang secara aktual berpengaruh terhadap peningkatan AKIP di Kecamatan Batang Lupar. Ini dapat mencakup faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan, kurangnya koordinasi antar unit, atau masalah internal lainnya.</p>	<p>8. Menindaklanjuti rekomendasi dalam Upaya perbaikan kinerja/solusi yang dirumuskan dalam LKJIP.</p>	<p>Telah Terlampir Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022.</p>
--	--	---	---	---

DOKUMEN
PERBAIKAN LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN
KAPUAS HULU
TAHUN 2023

Telah terlampir pada Laporan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memuat Rekapitulasi Renja PD dan Pencapaian Renstra dapat di lihat di table T-C.29 dan Evaluasi Renja Tahun 2022.

1. Telah tersusun pada Laporan Evaluasi Rencana Kerja tahun 2022



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Batang Lupar sd Tahun 2021 Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Uraian/Bidang/Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Laku (2021)				Target Program dan Kegiatan Rencana Perangkat Daerah tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah sd tahun berjalan (tahun 2022)	
			Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD Tahun 2022)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Target Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7(4x5)	8	9=(8/7)	10=(9/4)
7	Utara Kewilayahan								
701	Kecamatan	Musi SAKOP	00	0	-	-	00	00	100%
70101	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Pembinaan Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100%	100%	97,40%	97,40%	100%	99,64%	99,34%
70101.2.01	Kegiatan: Pemasangan, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teknisanya Dokumen Pemasangan, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	91,20%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
70101.2.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Pemasangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemasangan Perangkat Daerah (RDA, KJ, PA, RI)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
70101.2.01.02	Sub Kegiatan: Kombinasi dan Penyusunan Dokumen RDA-SKPD	Jumlah Dokumen RDA-SKPD dan Laporan Hasil Kombinasi Penyusunan Dokumen RDA-SKPD (Ry) dan Nota-Perbaikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	97,07%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
70101.2.01.06	Sub Kegiatan: Kombinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kombinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD (LAKP)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	88,24%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
70101.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teknisanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	97,48%	2 Laporan	2 Laporan	99,74%

Tabel T-C.32
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021 KECAMATAN BATANG LUPAR

No	Isi	Kode	Uraian/Bidang/Usaha Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2021 (skala Provinsi dan Kabupaten)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (skala Provinsi dan Kabupaten)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (skala Provinsi dan Kabupaten)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sd Akhir Tahun 2021 (skala Provinsi dan Kabupaten)				Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah sd Akhir Tahun 2021 (skala Provinsi dan Kabupaten)				Uraian/Program/Jenis	Uraian/Program/Jenis		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Membina dan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten	7 01 01	Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Pembinaan Program Penyanggah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	100	11.088.000,00	71,94	800.788,00	2.100.119,00	2,72	916.004,986	8,16	712.547,688	6,40	394.980,317	6,36	603.786,884	17,80	2.042.688,896	23,87	2.096.604,704	23,87	23,87	
		7 01 01 2 01	Pemasangan, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Teknisanya Dokumen Pemasangan, Penggantian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	17.000,000	91,10	4.670,000	9,470,000	0,00	-	0,00	-	7,16	1.221,600	91,08	1.888,000	10,24	9.110,000	46,04	7.880,000,00	46,04	46,04	
		7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Pemasangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemasangan Perangkat Daerah (RDA, KJ, PA, RI)	100	3.800,000	100	2.330,000	1,150,000	-	-	-	24,27	261,900	70,73	676,000	100	1.180,000	60,00	3.480,000	60,00	60,00	KEC. BATANG LUPAR	
		7 01 01 2 01 02	Kombinasi dan Penyusunan Dokumen RDA-SKPD	Jumlah Dokumen RDA-SKPD dan Laporan Hasil Kombinasi Penyusunan Dokumen RDA-SKPD (Ry) dan Nota-Perbaikan	100	3.800,000	87,27	1.180,000	1,180,000	-	-	-	-	87,27	1.010,000	87,27	1.010,000	37,41	2.170,000	37,41	37,41	37,41	KEC. BATANG LUPAR	
		7 01 01 2 01 06	Kombinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kombinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitos Realisasi Kinerja SKPD (LAKP)	100	3.400,000	88,24	1.000,000	1.000,000	-	-	-	88,24	940,000	-	88,24	940,000	37,25	2.030,000	37,25	37,25	37,25	KEC. BATANG LUPAR	
		7 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teknisanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	9.890.200,000	98,92	100.270,000	1.991.024,840	2,08	397.720,986	6,88	694.901,000	6,98	327.940,027	6,54	603.290,880	18,46	1.840.101,884	18,46	1.940.428,688,00	18,46	18,46	
		7 01 01 2 02 01	Penyusunan DSD dan Tugaspun ADJ dan Tugaspun CS (skala Kabupaten)	Jumlah Dokumen Penyusunan DSD dan Tugaspun ADJ dan Tugaspun CS (skala Kabupaten)	100	9.191.800,000	97,96	-	1.780.140,000	14,93	237.408,000	26,78	691.198,858	18,87	268.030,927	29,74	529.271,320	27,94	1.733.088,832	18,85	1.733.088,832	18,85	18,85	KEC. BATANG LUPAR
		7 01 01 2 02 02	Pembinaan Pemasangan dan Penggantian Perangkat SKPD	Jumlah Dokumen Pemasangan dan Penggantian Perangkat SKPD (RDA, KJ, PA, RI)	100	702.400,000	98,79	99.130,000	121.380,000	24,99	30.310,000	10,11	14.980,000	31,99	36.810,000	20,73	25.100,000	98,79	108.660,000	25,25	208.170,000	25,25	25,25	KEC. BATANG LUPAR

4. Telah terlampir pada SOP Pengukuran Kinerja Tahun 2023.



5. Telah terlampir pada SK Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



6. Telah Tersusun pada Laporan Money Triwulanan 2023.



7. Telah terlampir pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 berupa Aplikasi E-Sakip yang memuat informasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

8. Telah Terlampir Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022.

**TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI REVIU
SAKIP TAHUN 2023 KECAMATAN BATANG LUPAR**



**KECAMATAN BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR**
Jalan Panglima Ngunjung No. 01 Lantak Kode Pos : 78766

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja **Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten** Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 700.04/3204/A.1./I/Prov tanggal 29 Juli 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisanan mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "Kategori predikat" untuk memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja **Kecamatan Batang Lupar**, Tahun 2022, maka diperoleh nilai 58,76 dengan kategori CC (Cukup) dibandingkan dengan hasil nilai tahun 2020 yaitu 45,94 dengan kategori C (Kurang) adapun uraian berdasarkan komponen dapat dilihat pada table berikut ini :

NO.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2022
A.	Perencanaan Kinerja	30	19,20
B.	Pengukuran Kinerja	30	17,10
C.	Laporan Kinerja	15	8,70
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Jumlah		100	58,76

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Perencanaat daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana kerja tahun 2022, dan rencana kinerja tahun 2022 dari para pemangku perencanaat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa bobot kinerja dan dokumen cascading
- 2) Dokumen rencana kerja tahun 2022 sudah dipublikasikan, namun masih terdapat balok-balok yang basis dipublikasikan yaitu: Dokumen rencana kerja tahun 2022 tidak selaras terhadap rencana strategis

- 2021-2026 dalam hal tujuan, sasaran, penugasan indikator serta penetapan target kinerja.
 - 2) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan kinerja antar level jabatan dengan baik, utamanya basis level Kecamatan belum diteliti. Berdasarkan secara spesifik seluruh perencanaan antar berbagai indikator. Catatan belum dapat diperagiat daerah
 - 3) Susunan basis dan indikator kinerja yang jelas pada peragiat daerah belum di implementasikan dengan baik terutama program dan kegiatan. Perencanaat daerah belum dapat menunjukkan secara jelas inovasi yang berkesinambungan secara berkelanjutan dari IKU perencanaat daerah sebagai dengan output kegiatan. Hal ini terdapat karena indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan belum diidentifikasi
 - 5) Perencanaan kinerja yang ada belum dapat dibuktikan berdasarkan analisis kinerja yang memadai. Perencanaan kinerja peragiat daerah tidak dilakukan pada upaya monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada periode sebelumnya yaitu kegiatan monitoring SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) maupun dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang tidak dilakukan belum di dukung dengan data yang valid serta analisis permasalahan dan upaya Solusi yang cukup
- b. Pengukuran Kinerja**
- 1) SOP Pengumpulan Data Kinerja yang diuraikan peragiat daerah belum menunjukkan pedoman tentang bagaimana cara masing-masing level jabatan memperoleh data kinerja yang jelas dan dapat diandalkan
 - 2) Peragiat daerah telah memiliki defenisi operasional untuk mengukur indikator kinerja capaian pada level jabatan coordinator, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan kesinambungan indikator kinerja antar instansi. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya selarasnya indikator kinerja antar level pada dokumen perencanaan yang tidak dipertajam. Belum jelasnya Batasan pelayanan public yang diidentifikasi oleh Kecamatan Batang Lupar, berakibat lemahnya data kinerja pendukung yang IKN (Indeks Kepuasan Masyarakat)
 - 3) Pengukuran kinerja belum dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian strategi/kebijakan/ aktivitas/ anggaran dalam pencapaian kinerja yang efektif dan efisien. Pengukuran kinerja yang dilakukan belum dapat memberikan informasi akurat mengenai permasalahan